

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional, Desa merupakan komponen yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dengan membangun desa akan memberikan dampak pengurangan angka kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi terhadap masyarakat – masyarakat di daerah. Stigma desa yang dinilai belum bisa bersaing dalam pembangunan masih melekat, sehingga diperlukan pemberdayaan untuk menggali potensi dan peningkatan tata kelola sumber daya manusia sebagai alternatif dalam membangun Desa (Sudjatmiko, 2014).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, menyatakan bahwa pada tahun 2003 hingga 2014 bahwa ada 82.190 desa yang dilalui lembah, lereng, dan daratan. Jumlah ini terlalu banyak untuk dilakukan pemerataan pembangunan yang sesuai. Tentunya dengan adanya permasalahan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan dengan ketimpangan yang sangat jauh dari masyarakat perkotaan.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah di bidang ekonomi merupakan bagian dari perwujudan pemanfaatan potensi – potensi yang ada di dalam wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat menghasilkan keberhasilan potensi yang ada di suatu wilayah. Dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar, demografis, dan geologis

tentunya dalam mengembangkan potensi di dalam suatu wilayah tidaklah terlalu sulit.

Dimensi pembangunan merupakan bagian dari *subject matter* yang menjadi garapan dari sebuah pembangunan. Menjadi dari bagian upaya untuk melakukan sebuah penambahan nilai guna menjadi lebih baik, tentunya pembangunan memiliki bagiannya masing – masing dalam garapannya yang saling berkaitan yang pada akhirnya tidak dapat disatukan oleh satu kajian secara makro semata. Namun, ada juga sudut pandang mikro yang sangat bergantung pada *locus sphere* – nya masing – masing. Karena pada dasarnya musuh utama dalam sebuah pembangunan adalah keterbelakangan, kebodohan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kesehatan yang pada akhirnya bermuara pada masalah kemiskinan (Hasan & Azis, 2018).

Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang dinilai berhasil dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Inovasi yang diciptakan dalam membangun desa saat ini menjadi desa percontohan baik di Jawa Tengah maupun nasional. Pengelolaan berdasarkan BUMDes di Desa Ponggok melalui segmentasi kelompok ekonominya sangatlah variatif seperti wisata, pertokoan, perikanan, pertanian, koperasi, dll. Kini tercatat lebih dari 60% warga Desa Ponggok berpartisipasi dalam pengembangan Desa Ponggok begitu juga dengan pemberdayaannya (Kasila & Kolopaking, 2018).

Kota Kudus merupakan salah satu kota yang sebagian besar kegiatan perekonomiannya berasal dari kegiatan industri dan perdagangan. Mulai dari elektronik, rokok, kuliner, konveksi, kegiatan pasar dan pertokoan, dll. Selain itu Kota Kudus menjadi salah satu pusat perantauan dari penduduk – penduduk luar kota untuk bekerja atau menempuh pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Secara otomatis dengan kondisi Kota Kudus yang sedemikian rupa, memberikan banyak peluang usaha bagi masyarakatnya untuk membangun perekonomiannya secara mandiri. Terhitung sejak tahun 2014 terdapat lebih dari 12.938 perusahaan baik berskala industri besar maupun kecil sampai industri rumah tangga (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2014).

Ada pula program Pemerintah Desa Jati Kulon yang menginisiasi warganya agar terciptanya kebersihan dan kenyamanan warga melalui pemberdayaan warganya. Bermula dari keinginan warga untuk mengubah wajah Desa Jati Kulon semakin indah dan menarik minat untuk mengunjunginya. Ada 3 (tiga) program unggulan yang menjadi andalan Pemerintah Desa Jati Kulon yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan sekaligus memberdayakan masyarakatnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah

Berawal pada tahun 2012 pertengahan diinisiasi oleh seorang ibu rumah tangga bernama Seruni. Kegiatan ini awalnya ditujukan untuk mengendalikan pembuangan

limbah atau sampah rumah tangga di Desa Jati Kulon, yang pada akhirnya dikembangkan menjadi produk – produk kreatif olehnya. Mulai dari tas, dompet, sepatu, karpet, aksesoris pakaian, pernak - pernik, dan furniture. Saat ini mampu memberdayakan sekitar 66 warga yang mayoritas terdiri dari ibu – ibu PKK di Desa Jati Kulon. Ada pula program Bank sampah di Desa Jati Kulon pada awalnya hanya bergerak pada bagaimana menciptakan sampah ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan lagi nilainya. Demi mengurangi kapasitas sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Kudus dengan cukup mengolahnya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Jati Kulon yang kemudian dapat diolah lagi menjadi pupuk, daur ulang, dan juga produk kerajinan melalui program sebelumnya. Sekitar 127 warga menjadi anggota aktif dari program Bank Sampah ini.

2. Kampung Sayur

Merupakan bagian dari pengembangan program – program sebelumnya, program Kampung Sayur ini bertujuan untuk mempercantik Desa Jati Kulon dengan tanaman – tanaman sayur. Penamaan Kampung Sayur sendiri secara resmi diperkenalkan pada awal tahun 2018, berawal dari lomba penghijauan antar RT sejak tahun 2017 kemudian konsep ini diaplikasikan oleh Pemerintah Desa Jati Kulon sebagai

program pemberdayaan masyarakat. Disamping itu Kampung Sayur yang berkaitan dengan produksi tanaman sayur dari bibit sampai panen hingga produksi pupuk kompos melalui biopori. Tanaman sayur yang tersedia adalah sawi, kol, brokoli, okra, bawang, tanaman akar, kangkung, dll. Program ini diterapkan di masing – masing RT di Desa Jati Kulon di mana setiap Kepala Keluarga menanam sayuran dari jenis sayuran apapun di pekarangan depan rumah. Dengan setiap warga yang menyetor bibit dari tanaman yang akan diberikan imbalan. Kombinasi antara keuntungan aspek lingkungan dengan ekonomi dapat dilihat dari konsep Kampung Sayur ini.

3. Kampung Padang Bulan

Kampung Padang Bulan sendiri berkonsep pada wisata malam di Desa Jati Kulon di RW 1 yang cukup banyak pengunjung dari dalam maupun luar Desa Jati Kulon, dengan berkonsep hiasan lampu – lampu dan taman tepi jalan diringi dengan pagelaran seni tiap malam minggu dan tiap bulan. Peluang ini yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jati Kulon untuk mempersilahkan warganya untuk berjualan dan menawarkan produk atau jajanannya yang mana dianggap mampu memberikan dampak ekonomis bagi warga Desa Jati Kulon.

Melihat penataan yang sangat rapi tersebut dan kegiatan – kegiatan perekonomiannya, Muria News (21/03/18) Desa Jati Kulon menjadi salah satu desa percontohan di Kota Kudus yang sekaligus membawa pulang penghargaan Desa Terbaik se – Kabupaten Kudus pada tahun 2018 lalu.

Radar Kudus (22/02/19), Desa Jati Kulon kini diperhitungkan karena dinilai sebagai salah satu desa rujukkan untuk melakukan studi banding dengan inovasinya dalam pemberdayaan masyarakatnya. Tercatat 132 desa yang ada di Kota Kudus, hampir semuanya melakukan studi banding di Desa Jati Kulon. Ada juga dari luar Kota Kudus seperti Kepala Desa se – Kabupaten Sinjay Sulawesi Selatan dan Tuban Sidoarjo.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk meninjau dan meneliti bagaimana Desa Jati Kulon dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jati Kulon selama ini sehingga mendapat predikat Desa Terbaik se – Kabupaten Kudus pada tahun 2018. Peneliti juga akan mengkaji program pemberdayaan yang sejauh ini paling berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian warga Desa Jati Kulon. Hal ini juga mengenai tentang bagaimana usaha – usaha demi menjadikan Desa Jati Kulon berperan untuk meningkatkan pendapatan melalui program – programnya seperti sekarang ini yang sekaligus mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Jati Kulon dalam memberdayakan warga masyarakatnya.

Maka dari itu peneliti menentukan topik dan judul skripsi sebagai berikut *“Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus Tahun 2018)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perekonomian masyarakatnya dalam peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga Desa Jati Kulon pada tahun 2018?
2. Dari ke empat program pemberdayaan masyarakat manakah yang paling dapat dirasakan dilihat dari dampaknya oleh warga Desa Jati Kulon?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan Desa Jati Kulon pada tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara menyeluruh penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merancang sebuah kajian keilmuan yang dapat diambil dari sisi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan acuan untuk mengembangkan pembahasan terkait dengan penelitian sejenis yang diharapkan dapat membantu keberlangsungan akademik khususnya Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau pedoman tentang bagaimana nantinya Pemerintah Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dalam mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakatnya di masa yang akan datang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pendalaman topik yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa studi pustaka terdahulu yang berkaitan dengan topik atau judul, peneliti menemukan pembahasan yang serupa berkaitan dengan potensi desa dalam mengelola sumber dayanya dan potensi – potensi yang terus dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Akan menjadi sebuah pembeda dari penelitian sebelumnya, maka peneliti menempatkan fokus penelitian pada bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Jati Kulon dalam memberdayakan masyarakat serta mengukur sejauh mana keberhasilannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, tentunya peneliti

akan merujuk pada studi terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan tema topik pemberdayaan masyarakat, penggalan potensi, dan tentunya dari segi kebijakan. Berikut hasil beberapa penelitian yang telah peneliti rangkum:

1. (Kusniawati dkk., 2017) penelitian ini mengkaji bagaimana usaha – usaha pemberdayaan masyarakat berbasis pada potensi wisata yang ada di Desa Bumiaji Kota Batu. Kondisi alam yang mendukung dengan banyaknya potensi berbasis pertanian yang mengawali inisiasi adanya program desa wisata untuk mengembangkan potensi Desa Bumiaji. Pemberdayaan masyarakat terasa dengan adanya potensi – potensi perekonomian seperti homestay, agro wisata, atraksi kebudayaan lokal, dan juga pemandangan alam. Partisipasi warga Desa Bumiaji dalam berkontribusi dalam program desa wisata ini cukup membantu warga lainnya untuk mencari tambahan penghasilan. Program ini juga disertai dengan pendampingan dan tim desa wisata untuk memberikan penyuluhan bagaimana pengelolaan potensi desa wisata dengan satu tujuan dan inovatif untuk menarik wisatawan. Melalui program desa wisata ini menjadi fondasi untuk membangun Desa Bumiaji termasuk dalam memberdayakan masyarakatnya melalui potensi wisata alam.

2. (Hermawan, 2016) dengan adanya desa wisata tentunya memberikan nilai – nilai ekonomi tersendiri bagi wilayah tersebut. Tentunya dampak yang dirasakan membawa pengaruh sedikit banyaknya terhadap ekonomi masyarakat lokal. Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa yang mengembangkan konsep desa wisata sebagai kegiatan ekonominya. Tentunya dalam pengembangan desa wisata ini disertai dengan partisipasi masyarakatnya, tercatat lebih dari 75% warga terlibat untuk merancang dan mengembangkan wisata yang ada di Desa Nglanggeran. Terbukanya kesempatan kerja dari konsep desa wisata ini terealisasikan dengan cukup baik yang telah mempekerjakan masyarakatnya 370 lebih warga yang didalamnya meliputi pengurus Pokdarwis Desa Nglanggeran, Pemandu Wisata, dan Pelaku Kesenian. Selain itu mampu melahirkan jenis – jenis usaha baru yang telah mencatat lebih dari 86 pengusaha yang di dalamnya meliputi *homestay*, kuliner, dan kerajinan batik topeng. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa usaha – usaha yang dilakukan oleh masyarakat kini dapat menjadi mata pencaharian yang mampu memberikan nilai ekonomi yang pasti dari kunjungan para wisatawan dan retribusi.

3. (Andriyani, 2016) pengembangan potensi desa berbasis wisata juga diadaptasi oleh Desa Penglipuran Bali. Dalam melakukan pemberdayaan ini diberdayakan yang berasal dari modal dan bantuan fisik dari program PNPM Mandiri dengan beberapa bantuan dari pemerintah daerah. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dalam bentuk keterampilan dalam promosi, mengembangkan potensi wisata, ketersediaan akomodasi, mengembangkan mata pencaharian, kebersihan, dan keamanan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat. Dengan mengutamakan unsur kebudayaan adat istiadat, Desa Penglipuran mengkolaborasikan unsur – unsur modern yang ada untuk diadaptasi ke dalam sebuah industri pariwisata untuk menarik wisatawan tanpa harus menggeser akar budaya masyarakat setempat.
4. (Yuliana, 2018) salah satu wilayah yang saat ini tengah melakukan pengembangan eko wisata di daerah yaitu Batu Katak, Desa Batu Jong – Jong Kecamatan Bahorok. Selain itu masyarakat di wilayah tersebut juga mengembangkan tanaman – tanaman obat tradisional dari tanah Karo yang berasal dari adat budaya lokal. Namun, muncul permasalahan karena kurangnya SDM yang cukup profesional untuk mengelola eko wisata dan tanaman – tanaman obat yang mana membuat dampak ekonomi yang

belum bisa dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat wilayah tersebut pun tak surut, mereka masih percaya bahwa dengan adanya pelatihan dan pembinaan secara rutin mereka akan berkembang ke arah maju. Pasar – pasar yang di dari penjualan tanaman obat masih hanya sebatas di sekitaran Kabupaten Langkat dan sekitarnya, yang mana pangsa pasar belum cukup menjangkau ke seluruh daerah Sumatera maupun luar Sumatera.

5. (Ma'arif dkk., 2016) laut menjadi potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Desa Majakerta Kota Indramayu merupakan kawasan nelayan yang tepat berada di kawasan pesisir. Pemberdayaan yang dilakukan adalah untuk mengembangkan *skill* dan wawasan proses penangkapan ikan. Perhatian serius ini muncul dengan dibentuknya lembaga nelayan kecil Sumber Laut Desa Majakerta yang dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Di dalamnya juga terdapat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT), arisan, tabungan nelayan, serta koordinasi secara rutin bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
6. (Prasetyo, 2016) peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pionir pembangunan di Desa Pejambon

Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi – potensi lokal yang ada. Kondisi demografis Desa Pejambon yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong inilah yang menjadi fondasi untuk memberdayakan masyarakatnya. Sifat partisipatif dari warga Desa Pejambon mampu mengembalikan kondisi BUMDes yang sempat *collaps* dapat berdiri lagi. Peranan BUMDes pun cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pejambon. Dengan adanya pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pengelolaan usaha secara mandiri, disamping itu BUMDes juga memberikan simpan pinjam bagi warganya yang ingin membuka usaha serta menyewakan peralatan seperti molen, mesin pemotong rumput, dan perkakas berat lainnya untuk pemasukkan kas desa. Berdasarkan penelitian ini sekitar lebih dari 54% warga Desa Pejambon merasakan dampak yang diberikan oleh BUMDes dalam upaya memberdayakan masyarakat.

7. (Sulistiyani & Wulandari, 2017) pengelolaan sampah menjadi fokus pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini, tepatnya di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang terkendala oleh masalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Pemberdayaan ini diinisiasi oleh mahasiswa dari Jurusan Manajemen dan

Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada bersama dosen pembimbing. Upaya sosialisasi program disampaikan kepada kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kepala dusun, pamong desa, kelompok PKK, dan kelompok tani Desa Sitimulyo yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan. Dengan dana sekitar Rp. 7.500.000,00 sebagai modal utama mahasiswa untuk melakukan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat berhasil menarik kelompok PKK dan kelompok tani Desa Sitimulyo untuk menggarap sampah – sampah tersebut yang bernilai ekonomis. Mahasiswa melakukan penyuluhan terkait dengan pembuatan pupuk organik yang dapat dipraktikkan secara langsung oleh masyarakat melalui Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) yang awalnya sebagai pembelajaran dan juga sampingan untuk tambahan penghasilan. Kini Desa Sitimulyo mampu memproduksi pupuk organik yang tiap tahunnya terus meningkat rata – rata 1000 sampai 2000 kilogram.

8. (Sulfiyani dkk, 2016) potensi industri makanan khas tradisional yang ada di Kota Makassar membuat Kelompok Usaha Pipang Berkah dan Mandiri melihat sebagai peluang usaha. Usaha ini dikelola oleh dua keluarga yaitu keluarga

Suriato dan Rudi Hartono. Keberhasilan ini pun dapat dilihat dari semakin banyaknya pesanan dan permintaan dari dalam maupun luar negeri seperti Malaysia. Kelompok usaha ini mampu memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan seperti Desa Kesing Kecamatan Donri – Donri dan Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng melalui produksi Pipang dan Jipang yang merupakan makanan khas Bugis dan Makassar. Dengan sistem kemitraan usaha ini pun terus bergerak memberdayakan masyarakatnya dengan melakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia dan pembukuan untuk meningkatkan kualitas pemasaran dari produk.

9. (Sari, 2017) pemerintah telah mengeluarkan produk kebijakan untuk memberdayakan masyarakatnya secara mandiri yaitu salah satunya dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Program KUBe tentunya dalam pengaplikasiannya diperlukan pendampingan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya. Dengan pendampingan ini diharapkan bisa membentuk sebuah unit – unit usaha baru yang muncul dari masyarakat. Namun, dengan adanya keberadaan pendampingan ini tidak mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memadai. Salah satunya dengan upah yang sangat kecil yaitu sekitar Rp. 500.000,00 yang mana angka tersebut sangat jauh dari Upah

Minimum Regional (UMR) di seluruh Indonesia. Anggapan KUBe hanya sebagai sampangan tentunya menjadikan partisipasi masyarakat menurun, karena tidak ada kepastian dari kelanjutan usaha yang dilakukannya termasuk dalam upaya pendampingan yang dinilai belum maksimal. Kini KUBe dianggap belum berjalan secara efektif secara signifikan untuk masyarakat yang ada di Indonesia untuk memberdayakan daerah.

10. (Deswimar, 2014) kiat – kiat dalam pembangunan nasional tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Permasalahan Sumber Daya Manusia terus menjadi isu yang kuat untuk mengelola sebuah daerah untuk mengarah ke arah pembangunan yang maju. Terutama masyarakat pedesaan yang masih belum terhindarkan dari kemiskinan, banyaknya angka pengangguran, dan ketimpangan yang sangat terlihat. Sumbangsih masyarakat dalam membangun desa tergantung pada pengelolaan potensi yang dapat dimanfaatkan dan terus digali. Penyelenggaraan pembinaan dari lembaga atau institusi pemerintah dari departemen maupun non departemen hanyalah menjadi *support system* belaka, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan meng – eksekusi bagaimana konsep yang akan dijadikan sebagai fondasi membangun desa.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang bermakna kemampuan atau kekuatan. Konsep pemberdayaan masyarakat telah banyak memiliki definisi dan konsep dari para ahli, salah satunya yang diterangkan oleh Payne (dalam Adi, 2012) menyatakan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan dorongan atau *support* kepada setiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah tindakan – tindakan yang memberdayakan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan – hambatan pribadi dan sosial secara mandiri. Ada juga definisi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari usaha – usaha untuk memberikan kemampuan atau *skills* kepada individu atau sebuah komunitas. Dapat dikatakan dengan adanya kemampuan atau *skills* yang telah diberikan akan menciptakan kekuasaan dan wewenang yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri. Kata pemberdayaan sendiri berasal dari kata “daya” yang bermakna kemampuan untuk berusaha, dalam sebuah konsep pemberdayaan (*empowerment*) berkaitan erat dengan kekuasaan atau *power* (Anwas, 2013).

Menurut Simon (1993) pengertian pemberdayaan dapat dimaknai memberikan kemampuan atau kekuatan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengolah *resource*. Ada juga konsep yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat

menjadi beberapa aspek dari perspektif menurut Islam, yang dijelaskan oleh Muhtadi & Hermansyah (2013), sebagai berikut:

1. Partisipatif, keterlebitan secara aktif dari masyarakat dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan dalam melakukan pembangunan.
2. Keadilan dan kesetaraan gender, semuanya adil dan setara dalam setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam membangun tanpa mendiskriminasi salah satu gender serta dapat memberikan manfaatnya secara adil.
3. Kemandirian, program pemberdayaan masyarakat harus mampu menciptakan masyarakatnya yang mandiri sesuai dengan tujuan dan program tersebut.
4. Benefit, aspek ini menekankan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat. Program tidak boleh merugikan masyarakat, maka perlu upaya lebih untuk menciptakan keberhasilan agar dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat.
5. Keberlanjutan, segala upaya usaha dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk saat ini saja tetapi juga untuk kelanjutannya di masa depan.

Selain itu ada juga konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robbins, Canda, & Chatterjee (dalam Ramos dan Prideaux, 2014) menurut mereka pemberdayaan merupakan bagian dari proses

untuk menggambarkan sarana individu maupun kelompok untuk mendapatkan kekuasaan untuk mengakses sumber daya atau *resources* serta *benefit* untuk mengendalikannya atas kehidupan mereka. Pemikiran yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rappaport (dalam Hamill dan Stein, 2011) bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses berkolaborasi yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang kurang berdaya untuk mengelola sumber daya yang bernilai, diperdayakan untuk menggali dan meningkatkan akses sumber daya yang dapat dikontrol yang bertujuan sebagai solusi permasalahan pribadi dan masyarakat.

Di samping itu pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan derajat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi yang kurang mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk lepas dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Secara sederhana pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat memiliki kemampuan dan kemandiriannya (Mardikanto & Soebianto, 2015:61). Selain itu ada juga beberapa faktor keberhasilan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa aspek dengan konsep 4 dimensi kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan di dalam
2. Kekuasaan untuk
3. Kekuasaan atas
4. Kekuasaan dengan

Bentuk – bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi atas beberapa lingkup kegiatan, seperti yang diungkapkan oleh Mardikanto dan Soebianto (2015:114) sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Usaha yang paling utama dan harus diperhatikan dalam setiap usaha atau program pemberdayaan masyarakat. Hal ini berdasarkan dari tujuan utama dalam membangun dan memperbaiki kualitas atau mutu dari sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya masing – masing. Selain itu juga bina manusia merupakan bagian dari penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia seperti:

- a. Pengembangan kemampuan individu yang meliputi kemampuan *personality*, kemampuan di dunia kerja, dan pengembangan kemampuan di bidang keprofesionalan.
- b. Pengembangan kemampuan kelembagaan atau keorganisasian. Yakni dengan cara melakukan pembinaan untuk memperjelas visi, misi, dan budaya organisasi dengan memperhatikan kejelasan struktur organisasi yang meliputi kompetensi dan strategi di dalamnya. Adapun yang perlu diperhatikan adalah proses organisasi dengan pengelolaan di dalamnya yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu di dalam

organisasi. Interaksi eksternal anggota dengan *stakeholder*.

- c. Pengembangan kapasitas jejaring yaitu meliputi, pengembangan interaksi antar organisasi atau entitas dalam suatu sistem yang sama dan juga pengembangan interaksi dengan organisasi atau entitas yang berada di luar atau eksternal.

2. Bina Usaha

Kegiatan bina usaha merupakan salah satu yang terpenting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tanpa adanya bina usaha kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi masyarakat sebagai sarannya. Bina usaha yang dimaksud meliputi:

- a. Pemilihan jenis usaha
- b. Perencanaan kelayakan dalam berbisnis
- c. Perencanaan untuk melakukan investasi dan sumber – sumber permodalan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karir
- e. Manajemen produksi dan operasional
- f. Manajemen logistik dan keuangan
- g. *Research* dan *upgrading*
- h. Pengembangan sistem pengelolaan informasi bisnis

- i. Pengembangan koneksi dan kemitraan
 - j. Pembentukan badan usaha
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung
3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan merupakan bagian dari konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Pentingnya membangun rasa tanggungjawab kepada alam dan lingkungan untuk keberlangsungan ekosistem di masa depan. Dengan pemberdayaan masyarakat melalui bina lingkungan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterampilan dalam merawat dan menjaga alam serta lingkungan, bisa dilakukan dengan cara rehabilitasi, perlindungan, pelestarian dan *recovery*.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan merupakan objek yang sangat berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat. Dalam arti sempit kelembagaan sering diartikan sebagai suatu lembaga yang meliputi organisasi atau kelompok. Kelembagaan dapat diartikan secara luas oleh Hayami dan Kikuchi (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2015: 116) kelembagaan diartikan sebagai suatu *tools* yang umum dan harus ditaati oleh anggota suatu masyarakat.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari usaha untuk

membangun dan meningkatkan potensi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan dapat mengendalikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah baik itu sosial, budaya, dan ekonomi secara mandiri.

1.6.2. Peningkatan Pendapatan

Setiap usaha perekonomian berkaitan dengan pendapatan yang berdampak pada kualitas hidup setiap individu dan daerah. Pendapatan juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dan kelompok masyarakat. Di mana kesejahteraan atau kemakmuran di suatu wilayah dengan besarnya nilai tambah dari pendapatan yang didapatkan di wilayah tersebut (Mulyani, 2017).

Di sisi lain pendapatan sebagai salah satu faktor pendirian usaha. Karena dengan adanya suatu pendapatan dapat dikatakan suatu usaha tersebut masih berlanjut dan layak untuk dikembangkan walaupun masih ada hal – hal lain yang menjadi pertimbangan untuk sebuah usaha tetap dilanjutkan. Jumlah pendapatan perlu diperhatikan yang mana akan diketahui bagaimana keuntungan atau kerugiannya (Gustika, 2016).

Menurut Winardi 1986 (dalam Hayati, 2012), pendapatan merupakan hasil dari segala usaha atau pekerjaan yang didapatkan oleh setiap individu dapat berupa uang atau barang. Atau segala hasil yang didapatkan berupa uang atau materi lainnya yang telah dicapai dengan penggunaan kekayaan atau jasa.

Ada juga menurut Muhammad Rifani (2013), pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) definisi:

1. Pendapatan Berbentuk Uang

Hasil dari pekerjaan pokok, sampingan, kerja kadang – kadang, dan lembur yang diterima berupa gaji atau upah. Adapun usaha pribadi yang meliputi komisi penjualan, hasil bersih, dan kerajinan rumahan. Sedangkan hasil dari investor yaitu pendapatan yang didapatkan dari hak pemilik saham (berbentuk lainnya).

2. Pendapatan Berbentuk Barang

Upah yang dibayarkan dalam bentuk bahan pakanan pokok, transportasi, tempat tinggal, jaminan kesehatan, barang produksi, dan komisi di rumah.

Ditambahkan juga oleh Muhammad Rifani (2013), peningkatan pendapatan dapat diterjemahkan sebagai *revenue* atau bertambahnya asset yang berdampak pada peningkatan ekuitas kepemilikan yang berasal dari bertambahnya modal baru dari *owner* dan juga bukan bagian dari bertambahnya *liabilities*.

Di sisi lain peningkatan pendapatan juga mempengaruhi penambahan asset pribadi yang digunakan sebagai modal awal dan baru. Tentunya dari segi peningkatan pendapatan berpengaruh pada ketersediaan modal atau asset tiap individu. Dalam program pemberdayaan masyarakat menurut Gustika (2016) ada 2 (dua) asset

utama yang mempengaruhi usaha – usaha dalam meningkatkan pendapatan, yaitu:

1. Tempat/Wadah

Faktor terpenting dalam membangun usaha guna meningkatkan pendapatan adalah salah satunya ketersediaan tempat atau wadah. Tempat atau wadah yang menaungi suatu usaha menjadi sebuah hal primer yang dapat mempengaruhi nilai pendapatan atau keuntungan suatu individu atau kelompok yang sedang membangun usaha. Faktor tempat dapat dikatakan sangat penting tergantung pangsa pasar yang ingin dan berpotensi untuk dicapai, begitu juga wadah yang menaungi program pemberdayaan masyarakat yang menentukan arah kegiatan dan program pemberdayaan perekonomian. Tempat lebih menekankan bahwa dengan adanya ketersediaan tempat atau lahan maka usaha akan bisa berjalan sesuai dengan kemauan pelaku usaha atau masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat, sedangkan wadah berfungsi untuk menaungi usaha atau kegiatan yang dijalankan sehingga pelaku usaha atau masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan kegiatan atau ketentuan di dalam wadah yang menaunginya tersebut.

2. Modal

Suatu usaha berkaitan erat dengan modal, tanpa adanya modal suatu usaha tidak akan bisa terus *survive* dengan baik. Pada dasarnya setiap usaha dipengaruhi oleh modal apa yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Selain itu ada 2 jenis modal, yaitu:

a. Modal Finansial

Jenis modal ini sangat bergantung kepada kemampuan finansial pelaku usaha. Pengaruh ketersediaan finansial sangat mempengaruhi berjalannya suatu usaha. Di sisi lain sebagian pelaku usaha menganggap dengan ketersediaan finansial mampu mengakomodir sebagian besar suatu usaha. Misalnya inventarisasi atau pengadaan barang, *upgrading skill*, dan modal kebutuhan usaha. Dalam kasus ini masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat akan diberikan bantuan finansial yang biasanya cenderung disertai pemberian pemahaman terkait pengelolaan finansial guna membantu permodalan usaha masyarakat.

b. Modal Keahlian

Keahlian atau *skill* bagi sebagian pelaku usaha adalah salah satu *basic* yang sangat penting dalam membangun usaha. Dalam perspektif ini pelaku usaha lebih

mengunggulkan keahlian dibandingkan kemampuan finansial. Karena dalam keterbatasan finansial pun para pelaku usaha ini dapat membangun dan mengembangkan usahanya. Dengan kata lain program pembedayaan masyarakat yang dilakukan lebih menekankan kepada kemampuan atau keahlian yang pada akhirnya menciptakan nilai jualnya sendiri.

Pelaku kebijakan membangun program pemberdayaan masyarakat sebagian besar bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan. Jika yang menjadi tujuan dari *policy maker* adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka program tersebut harus mempunyai benefit atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

Menurut Anwas (2013) ada 2 indikator program pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan memiliki benefit kepada masyarakat, yaitu:

1. Mampu Menciptakan Peluang

Indikator ini merujuk kepada seberapa jauh keberhasilan ini dari seberapa program pemberdayaan yang telah dijalankan mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakatnya. Contohnya di suatu daerah pada awalnya tidak memiliki kompetensi untuk mengelola wilayahnya, kemudian dengan adanya program pemberdayaan masyarakat

diharapkan menciptakan kompetensi baru yang dimiliki seperti wisata, kerajinan, budi daya tanaman, kios – kios, dll.

2. Memberikan Nilai Ekonomis

Program pemberdayaan masyarakat harus mampu memberikan nilai – nilai ekonomis kepada masyarakat. Mampu memberikan timbal balik ekonomi seperti upah jasa atau barang yang dihasilkan dari masyarakat sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat yang diberikan.

Dengan demikian peningkatan pendapatan dapat diartikan sebagai bertambahnya asset yang berasal dari pekerjaan pokok, sampingan, dan pekerjaan yang kadang – kadang dikerjakan yang mampu memberikan dampak ekonomi dengan mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran. Potensi untuk meningkatkan pendapatan dapat dilihat dari bagaimana kegiatan dan program perekonomian masyarakat di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi pendapatan yang didapatkan.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk mengurangi kesulitan atau beban sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan penelitian ini maka

secara garis besar program pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon merujuk pada program peningkatan pendapatan Desa Jati Kulon.

1.7.2. Program Peningkatan Pendapatan

Dengan membandingkan nilai – nilai peningkatan pendapatan dari program tersebut yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain itu perlu diperhatikan bagaimana penerapan sebuah program atau kebijakan yang akan diterapkan sesuai tujuan atau tidak. Terlebih lagi implementasi perlu mempertimbangkan aspek output dan outcome. Ada pula klasifikasi program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Jati Kulon sebagai berikut:

1. Pengolahan Sampah Melalui Kerajinan

Bertujuan untuk menjadikan sampah menjadi daya kreasi yang dapat menghasilkan nilai – nilai ekonomi bagi masyarakat.

2. Program Bank Sampah

Pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada pelestarian lingkungan dengan menimbun sampah – sampah organik dan non organik yang dapat dikonversikan menjadi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

3. Kampung Sayur

Pemberdayaan masyarakat melalui penghijauan dengan cara penanaman tanaman – tanaman hias dan sayur serta

pembuatan biopori yang dapat diperjual belikan. Selain berdampak bagi perekonomian sekaligus berdampak positif bagi lingkungan dengan adanya penghijauan.

4. Kampung Padang Bulan

Konsep wisata lokal di Desa Jati Kulon ini diciptakan untuk memperkenalkan Desa Jati Kulon kepada masyarakat luar sekaligus memberdayakan masyarakat dibidang ekonomi melalui pendirian lapak – lapak yang menjual jajanan dengan partisipasi warga Desa Jati Kulon di dalamnya.

1.8. Definisi Operasional

Table 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Program Pengelolaan Sampah
	2. Kampung Sayur
	3. Kampung Padang Bulan
Aspek Pemberdayaan	1. Partisipasi Masyarakat
	2. Benefit
	3. Keberlanjutan
	4. Kemandirian
Peningkatan Pendapatan	1. Tempat/Wadah
	2. Modal
	3. Peluang
	4. Nilai Ekonomis

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif bisa berupa kata – kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati di lapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historik dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Fokus peneliti dalam penelitian kualitatif deskriptif merujuk tentang bagaimana Pemerintah Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dapat melihat potensi – potensi ekonomis yang ada di wilayahnya, yang kemudian diadaptasi menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada peningkatan pendapatan warga Desa Jati Kulon.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dengan meninjau secara langsung program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang ada di desa tersebut.

1.9.3. Unit Analisis Penelitian

Dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Dalam Sugiyono (2017: 234), mengemukakan ada empat Alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organisasi domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori – teori yang telah ada.

1.9.4. Data & Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada terkait proses pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus melalui segmentasi kelompok ekonomi. Adapun pihak terkait yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan data penelitian adalah Kepala Desa Jati Kulon, Kepala Bidang Pembangunan Desa Jati Kulon, dan sebagian masyarakat yang berpartisipasi dalam kelompok ekonomi di Desa Jati Kulon. Dengan demikian sumber data yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu menurut Narimawati (2018: 98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa; Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dengan kata lain data yang diperlukan dalam penelitian ini akan menggali informasi dari narasumber yang berperan atau berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus melalui peningkatan pendapatan. Berkaitan dengan kasus tersebut peneliti nantinya akan mendapatkan data primer yang dibutuhkan melalui Pemerintah Desa Jati Kulon yaitu Kepala Desa, dan pihak – pihak yang menjadi aktor dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon serta masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus.

Table 2. Data Primer

No.	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peran Pemerintah Desa Jati Kulon dalam mendukung pemberdayaan masyarakat	Kepala Desa Jati Kulon	Wawancara

	dengan adanya kelompok ekonomi tahun 2018.		
2.	Jumlah masyarakat yang ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon.	Kepala Bidang Pembangunan	Wawancara
3.	Latar belakang peluang usaha, awal mula dibentuknya usaha, dan pengaruh perekonomian yang diberikan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan di Desa Jati Kulon.	Masyarakat yang tergabung dalam kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Jati Kulon	Wawancara

2. Data Sekunder

Selanjutnya sumber data sekunder, menurut Uma Sekaran (2016) adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada catatan atau dokumentasi, berkas atau arsip, dan artikel yang memuat tentang

bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon melalui peningkatan pendapatan di tahun 2018.

Table 3. Data Sekunder

No.	Data	Sumber Data
1.	Arsip dan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018.	Pemerintah Desa Jati Kulon dan Aktor yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat
2.	Keberhasilan Desa Jati Kulon sebagai salah satu desa percontohan dalam memberdayakan masyarakatnya.	Artikel dari media

1.10. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam menyimpulkan kesimpulan yang berawal dari pernyataan atau fakta yang menjelaskan yang mengarah kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Di dalam teknik pengumpulan data terbagi atas tiga hal yaitu:

1. Wawancara

Interview/Wawancara, Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data dan hal – hal yang berkaitan dengan proses pemberdayaan

masyarakat Desa Jati Kulon melalui segmentasi kelompok ekonomi dengan menggunakan alat bantu seperti kamera dan recorder.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menjelaskan keadaan konsep yang sedang diteliti, dokumentasi pada saat melakukan tinjauan lapangan dan berupa dokumentasi resmi seperti arsip, berkas – berkas seperti Laporan Pembangunan Desa Jati Kulon tahun 2018 yang mengacu pada pemberdayaan masyarakat, serta artikel atau berita yang memuat hal – hal yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian masyarakat melalui segmentasi ekonomi di Desa Jati Kulon.

1.11. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam hal ini peneliti berusaha melakukan mengorganisasikan dan mengurutkan data secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya. untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Kemudian data yang

telah terkumpul tersebut dinyatakan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh subyek, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan kejadian, yang faktual dan akurat mengenai fakta – fakta yang terjadi selama penelitian yang dilakukan di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus.

1. Reduksi Data

Pada tahap kegiatan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian mengolah data yang didapat saat dilapangan melalui metode wawancara dengan Kepala Desa Jati Kulon, Kepala Bidang Pembangunan, dan sebagian elemen masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada peningkatan pendapatan.
- b. Penelitian ini akan menyederhanakan temuan data eksternal (internet/berita) selain data temuan dari Kepala Desa Jati Kulon, Kepala Bidang Pembangunan, dan sebagian elemen masyarakat yang tergabung dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada peningkatan pendapatan.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil – hasil penelitian proses pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon melalui peningkatan pendapatan dalam bentuk data. Hasil seluruh wawancara dipilah – pilah sesuai dengan indikator penelitian yang ditetapkan. Dan kemudian dideskripsikan dan dibandingkan dengan teori yang ada.

3. Kesimpulan

Pada tahap ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari proses penelitian bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Desa Jati Kulon melalui peningkatan pendapatan dalam bentuk data dan juga sejauh mana gagasan tersebut mampu memberikan pengaruh ekonomis bagi masyarakat di Desa Jati Kulon.